

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mendorong pemerintah pusat untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009, p. 20). Guna mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Organisasi sektor publik sebagai badan yang identik dengan pemerintahan negara dan berorientasi kepada kepentingan publik. Dan sebagai representasi negara, organisasi sektor publik memiliki peran yang sangat penting terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sehingga selalu menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. (Prayoga and Yuhertiana, 2021, p. 69)

Pelaporan keuangan sendiri merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas baik harus dimiliki oleh suatu perusahaan, dikarenakan hal itu menjadi salah satu faktor keberhasilan dari

suatu organisasi. Adanya tuntutan bagi sebuah organisasi untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan inovasi agar dapat tetap bertahan dan tetap stabil dalam era globalisasi ini.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketentuan tersebut menerapkan karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, terukur atau sebanding dan dapat dipahami. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa laporan keuangan disajikan bebas dari kesalahan penyajian ide dan kesalahan material, objektif dan dapat diverifikasi guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kementerian Agama ialah satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang keagamaan dan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Berdasarkan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2020 menunjukkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama mendapatkan predikat baik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK, Akhsanul Khaq menuturkan meskipun sudah meraih opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh. Dan jika permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan oleh BPK dibiarkan berulang, maka akan terakumulasi menjadi permasalahan yang material dan dapat berdampak terhadap penurunan opini. (<https://www.bpk.go.id/id>, 2020)

**Tabel 1. 1**

Perkembangan Opini LKKA Tahun 2016-2020

Tahun	Kementerian/Lembaga	Hasil Opini BPK RI
2016	Kementerian Agama	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Kementerian Agama	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Kementerian Agama	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Kementerian Agama	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Kementerian Agama	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: (<http://itjen.kemenag.go.id/web/>, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) selama lima tahun berturut-turut (2016-2020) telah mendapatkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa temuan

permasalahan oleh BPK yang terjadi di Satuan Kerja Kementerian Agama. Beberapa permasalahan tersebut tentunya berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama.

Opini WTP ternyata tak menjamin tidak adanya korupsi. Kendati sudah mengalami peningkatan opini, sayangnya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah. Salah satu masalah yang kerap ditemui dan selalu menjadi temuan berulang adalah masalah pengelolaan aset tetap. Padahal aset tetap pemerintah memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Di beberapa entitas yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Misalnya, Kementerian Agama mendapat WTP, belakangan ditemukan korupsi. Provinsi Sumatera Utara mendapat WTP, tapi Gubernur terlibat korupsi. Hal sama terjadi di beberapa entitas pemerintah. Kasus korupsi pada entitas yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tak sedikit yang mensinyalir opini WTP bisa diperjualbelikan. (Gunarwanto, 2017)

Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa capaian WTP dalam kualitas LKKA yang telah diraih selama 5 kali berturut-turut pada tahun 2016-2021 bukan berarti benar tanpa pengecualian melainkan WTP yang artinya masih ada temuan-temuan yang masih harus ditindaklanjuti dan dicari solusinya antara lain:

- Ditemukannya sejumlah dana pada satuan kerja Kementerian Agama yang ditransfer ke rekening pribadi. Temuan ini

diperoleh saat BPK RI melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019.

- Ditemukannya beberapa kasus korupsi pada satuan kerja Kementerian Agama.

Penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan. Permasalahan seperti inefisiensi penggunaan anggaran, tidak berjalannya fungsi penyarian yang baik terkait laporan keuangan, kesalahan penginputan data dan rendahnya pemahaman dan loyalitas para pengelola keuangan terhadap akuntansi pemerintah memungkinkan timbulnya resiko terhadap laporan keuangan. Ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum memenuhi kriteria relevan, andal, konsisten, akurat dan tepat.

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan yang baik adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input, proses dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi dari sistem pelaporan keuangan yang baik. (Eveline, 2016, p. 2)

Sistem informasi akuntansi adalah bagian atau sistem dari suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun informasi keuangan guna menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal dan internal organisasi. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda tergantung pada tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya.

Sistem informasi akuntansi yang baik harus dioperasikan oleh sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan yang andal. (Rizal Faizal, 2018)

Hal penting lainnya yang tidak dapat diabaikan guna mencapai pelaporan keuangan yang berkualitas ialah sistem pengendalian internal. Tingginya kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama juga ditentukan oleh kualitas pengelolaan dari pengendalian internal institusi Pemerintah. Pengendalian internal yang lemah menyulitkan pendeteksian kecurangan serta ketidakakuratan dalam proses akuntansi, sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

Efektivitas dari sistem pengendalian internal diperlukan untuk merencanakan dan pelaporan hasil audit yang akan dievaluasi oleh komite sistem pengendalian internal. Fungsi sistem pengendalian internal adalah sebagai sumber informasi yang independen mengenai berbagai kegiatan organisasi guna membantu dalam pengambilan keputusan yang obyektif dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diperlukan kompetensi khusus dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal ini dikarenakan peran dari Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan keberhasilan suatu lembaga dalam menunjang pelaksanaan tugas demi mencapai tujuannya. Begitu juga pada entitas pemerintahan, guna menerbitkan Laporan Keuangan Kementerian Agama

yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang paham serta kompeten dalam penerapan akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Kompetensi dianggap sebagai karakteristik dasar (*underlying characteristic*) karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang dan dapat digunakan untuk memprediksi berbagai situasi kerja tertentu. Kemudian diasumsikan bahwa ada korelasi antara perilaku dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja. Dalam organisasi publik, peran sumber daya manusia lebih dititikberatkan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, agar organisasi tetap bereputasi baik dengan kinerjanya yang luar biasa dan bertanggung jawab di mata masyarakat.

Tidak hanya sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia saja yang diperlukan guna menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas baik. Ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan, yaitu *Good Governance*. *Good Governance* juga diperlukan untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas baik. Dikarenakan sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan, seperti melakukan manipulasi akuntansi (*earnings management*) dan kecurangan (*fraud*) yang merugikan berbagai kalangan. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya masalah akuntabilitas, transparansi laporan keuangan, serta pengendalian internal oleh sumber daya manusia yang baik pula dalam suatu organisasi sektor publik.

Akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, efektivitas, dan responsivitas merupakan bagian dari *Good Governance*. Menurut penelitian yang telah menguji pengaruh dari *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh (Sinaga and Hidayat, 2017) menyatakan bahwa penerapan prinsip - prinsip *Good Governance* ini sangat berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya bahwa dengan adanya penerapan governance yang maksimal maka akan semakin menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik tata kelola dari sebuah organisasi maka akan semakin baik pula kualitas dari laporan keuangan yang akan dihasilkan, begitu juga sebaliknya.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya, sebab pada tahun 2019 ditemukan adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sendiri. Dan juga faktor pendukung lainnya adalah statement dari Bapak Azhar Suryansyah M, SH. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang mengatakan bahwa "Di Kemenag Jawa Timur sendiri masih terdapat bau mal-administrasi pejabat. Misalnya, ada yang belum waktunya naik jabatan, terpaksa naik jabatan. Ini seharusnya ada tindaklanjutnya. Selain itu, dugaan korupsi di infrastruktur, misal pembangunan KUA, madrasah, pungli haji termasuk dugaan penggelembungan dana Rakerpim di Shangrila.

Menurut Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama RI jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki populasi terbesar ke-2 sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan keuangan serta akan lebih mudah

dalam mengambil data dan menyebarkan kuesioner. Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga sedang menjadi sasaran pemeriksaan oleh BPKP, BPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka peneliti memilih Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan merupakan salah satu hal yang menarik yang menjadikan motivasi bagi penulis untuk meneliti lebih dalam akan hal ini. Dengan adanya transparansi pelaporan keuangan pemerintahan, masyarakat dapat menilai cara kerja pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis mengenai fenomena yang terjadi, khususnya mengenai predikat opini yang diperoleh Kementerian Agama yang diukur dari hasil BPK serta didukung oleh adanya ketidakpastian dan inkonsistensi dari hasil penelitian yang ada. Maka menjadi pendorong sebagai peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai hal tersebut agar dapat menguji secara lanjut kualitas laporan keuangan kementerian agama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan *Good Governance* sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikannya pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Serta apakah *Good Governance* dapat memoderasi pengaruh dari penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas dari laporan keuangan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah penulis deksripsikan di atas, maka dapat dibangun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi mempengaruhi Kualitas dari Laporan Keuangan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi Kualitas dari Laporan Keuangan?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Kualitas dari Laporan Keuangan?
4. Apakah *Good Governance* sebagai variabel moderasi mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas dari Laporan Keuangan?
5. Apakah *Good Governance* sebagai variabel moderasi mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas dari Laporan Keuangan?
6. Apakah *Good Governance* sebagai variabel moderasi mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan penentuan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris, bahwa :

1. Sistem Informasi Akuntansi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2. Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
4. *Good Governance* Sebagai Variabel Moderasi mempengaruhi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
5. *Good Governance* Sebagai Variabel Moderasi mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
6. *Good Governance* Sebagai Variabel Moderasi mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi literatur, bahan bacaan, dan referensi di bidang akuntansi mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas dari pelaporan keuangan organisasi sektor publik dengan good governance sebagai variable pemoderasi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi implementasi atas teori-teori yang didapat oleh peneliti selama menempuh pendidikan perkuliahan terkait bidang akuntansi di UPN "Veteran" Jawa Timur.

###### b. Bagi Akademisi :

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti lain sebagai review dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh dari penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas dari laporan keuangan organisasi sektor publik.

c. Bagi Instansi :

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur khususnya sebagai sumber informasi baru mengenai penerapan dari faktor internal yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan.